



EVALUASI RKPD SEMESTER II

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat anugrah-Nya, maka Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Paser Tahun 2019 Semester II dapat disusun. Penyusunan dokumen ini dalam rangka memenuhi salah satu tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Paser melaksanakan evaluasi Renja SKPD untuk Tahun 2019.

Penyusunan Evaluasi RKPD tahun 2019 sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Hasil evaluasi masing-masing dikumpulkan dan dievaluasi kembali oleh Bappedalitbang untuk mengetahui hasil evaluasi kinerja terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan secara keseluruhan dalam satu Kabupaten. Namun demikian mengingat keterbatasan yang dimiliki Bappedalitbang Kabupaten Paser dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pengendali dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati, Bappeda Kabupaten Paser membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang sekaligus informasi bagi seluruh pihak.

Tana Paser, Januari 2020

Tim Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan

Bappedalitbang Kabupaten Paser

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Latar belakang	1
1.2.	Maksud dan tujuan	2
1.3.	Dasar hukum	2
1.4.	Ruang lingkup	3
1.5.	Sumber data	3
1.6.	Metode evaluasi	4
1.7.	Sistematika penulisan	4

BAB II PENJABARAN RPJMD KABUPATEN PASER TAHUN 2016-2021

2.1.	Umum	6
2.2.	Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Tahun 2019	7
2.3.	Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Ke Dalam APBD Tahun 2019	17
2.4.	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2019	20

BAB III HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN PASER TAHUN 2019 DAN RPJMD KABUPATEN PASER TAHUN 2016-2021

3.1.	Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Paser tahun 2019	22
3.2.	Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Paser s/d Tahun 2019	22
3.3.	Capaian Kinerja dan Realisasi Target Kinerja RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2019	23

BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN PASER TAHUN 2019

4.1.	Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2019	46
4.2.	Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2019	48
4.3.	Tindak Lanjut	50
4.4.	Kebijakan Pelaksanaan RKPD Masa Yang Akan Datang	52

BAB V KESIMPULAN

5.1.	Kesimpulan	54
5.2.	Rekomendasi	54

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1. Alur Perencanaan & Penganggaran	6
---	---

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. Penjabaran Program RKPD	8
TABEL 2.2. Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dan APBD.....	17
TABEL 3.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2019.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 46 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2019 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Paser Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019. Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2019 disusun untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2019.

Tujuan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Paser adalah untuk:

- a. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2019
- b. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2019
- c. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2019 adalah:

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

1.4 Ruang Lingkup

Kegiatan evaluasi dan pengendalian RKPD Kabupaten Paser untuk Semester II Tahun 2019 dikoordinasikan oleh Bappedalitbang Kabupaten Paser. Dari kegiatan ini dapat diperoleh bahwa total 41 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Paser selaku pengelola anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, berkewajiban untuk memasukkan laporan capaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Semester II sampai dengan bulan Desember tahun 2019.

1.5 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Paser Semester II Tahun 2019 adalah :

- a. Laporan realisasi Renja masing-masing Perangkat Daerah.
- b. Data LRA untuk Realisasi Anggaran Belanja Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser

1.6 Metode Evaluasi

Metode evaluasi yang digunakan untuk penyusunan laporan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Paser Semester II Tahun 2019 adalah dengan menggunakan Form Evaluasi Renja Kabupaten sesuai dengan Lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2016.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2019

BAB I.	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Maksud dan Tujuan
	1.3 Dasar Hukum
	1.4 Ruang Lingkup
	1.5 Sumber Data
	1.6 Metode Evaluasi
	1.7 Sistematika Penulisan
BAB II.	PENJABARAN RPJMD KABUPATEN PASER TAHUN 2016-2021
	2.1 Umum
	2.2 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2019
	2.3 Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD ke dalam APBD Tahun 2019
	2.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2019
BAB III.	HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN PASER TAHUN 2018 DAN RPJMD KABUPATEN PASER TAHUN 2016-2021
	3.1 Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Paser Tahun 2019
	3.2 Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Paser s/d Tahun 2019
	3.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Target Kinerja RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2019

BAB IV	FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN PASER TAHUN 2019
	4.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2019
	4.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2019
	4.3 Tindak Lanjut
	4.4 Kebijakan Pelaksanaan RKPD Masa Yang Akan Datang
BAB V	KESIMPULAN
	1.1 Kesimpulan
	1.2 Rekomendasi

BAB II

PENJABARAN RPJMD KABUPATEN PASER TAHUN 2016-2021

2.1 Umum

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan.



Gambar 2.1 Alur Perencanaan & Penganggaran

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa RPJMD Kabupaten Paser diterjemahkan dari visi dan misi Kepala Daerah yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Paser 2006-2025, RPJMD Kalimantan Timur 2014-2018, RPJPD Kalimantan Timur 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun, RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Dokumen RPJMD juga disusun dengan memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Paser, RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan RTRW Nasional. Dokumen RPJMD akan digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dalam hal ini RPJMD merupakan dokumen penting bagi rujukan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Paser.

2.2 Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Tahun 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser 2005-2025 untuk tahapan pembangunan lima tahunan. Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2019 dikelompokkan menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwajibkan melalui prestasi kerja dalam mencapai standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan dan perundangan. Sedangkan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Pada RKPD tahun 2019 ditetapkan berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan pada pembangunan infrastruktur, sumberdaya manusia, pertanian dalam arti luas, serta kegiatan penunjang lainnya, maka dijabarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan.

Tabel 2.1 Penjabaran Program RKPD 2019 sesuai dengan RPJMD 2016-2021
Kabupaten Paser

No	Urusan	Program	Indikator Kinerja
Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan	Wajib Belajar Sembilan Tahun	Persentase Ruang Kelas SD dan SMP Kondisi baik
			Persentase SD dan SMP yang memiliki ruang UKS
			Persentase SD dan SMP yang memiliki Laboratorium
			Persentase unit pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan
			Nilai rata-rata UAN SD dan SMP
		Pengembangan PAUD	APK PAUD
			Persentase Guru PAUD Formal bersertifikat
		Pendidikan Non Formal	Angka putus sekola masyarakat
			Jumlah lembaga pendidikan keterampilan (Unit)
			Jumlah keaksaraan mandiri (Orang)
			Persentase tenaga tutor yang memiliki kualifikasi
		Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	Persentase Guru SD dan SMP Bersertifikat
			Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan
		Pengembangan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang sudah dicapai
2	Kesehatan	Pemerataan Tenaga Kesehatan	Rasio Dokter (per 100.000 penduduk)
		Obat dan perbekalan kesehatan	Cakupan ketersediaan obat esensial generic di faskes
		Upaya kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang terlayani puskesmas
			Cakupan pelayanan rumah sakit
		Pengembangan Lingkungan Sehat	Rumah Tangga ber-PHBS
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Balita berat badan di bawah garis merah (BGM)
			Cakupan pelayanan kesehatan balita
			Rasio Posyandu per 1000 balita
		Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persalinan ditolong tenaga kesehatan

			Pelayanan Ibu Nifas
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan promosi kesehatan
		Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita mendapat kapsul Vit. A
			Persentase ibu hamil mendapat Fe90
			Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penanganan Penderita Penyakit BC
			Angka Prevalensi Kusta (per 10.000 penduduk)
			Angka Penemuan Penderita Penyakit DBD
			Prevalensi hipertensi
			Cakupan desa/kelurahan UCI (persen)
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut
		Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan	Persentase jembatan kondisi baik
		Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten (Km)
			Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap
		Tanggap darurat jalan dan jembatan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi darurat yang ditangani
		Peningkatan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan Jembatan	Sistem Data Base Jalan dan Jembatan Kabupaten
		Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase jalan kabupaten dengan turap/talud/bronjong dan gorong-gorong di wilayah rawan longsor
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase Areal Pemakaman yang berkondisi baik
		Perencanaan Tata Ruang	Cakupan kawasan yang sudah memiliki perda RDTR
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan penggunaan kawasan yang sesuai perda RTRW dan RDTR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Jumlah desa yang memiliki sarana penampungan air baku
		Program Pengendalian Banjir	Persentase luas areal genangan
		Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Persentase jalan perdesaan dalam kondisi baik
		Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah layak huni yang terbangun (unit)
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (air minum)	Persentase kecamatan yang terkoneksi Jaringan Air Bersih
		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku (PDAM)	Persentase Desa yang terjangkau Jaringan Air Bersih PDAM

		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku (Non PDAM)	Cakupan desa yang telah memiliki sarana pengolahan air bersih (persentase)
		Program Peningkatan dan Fasilitas Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelistrikan	Rasio elektrifikasi
			Jumlah Kecamatan yang Mendapat PLTS Pemukiman
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase tenaga kerja yang bekerja disektor IKM
			Jumlah produk IKM yang bersertifikasi
		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Kontribusi industri kecil menengah terhadap PDRB
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal (operasi/patrol)	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah forum adat atau agama dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
		Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal (SDM dan sarana & Prasarana)	Jumlah linmas per 10.000 penduduk
			Jumlah aksi unjuk rasa amarkis
		Pendidikan Politik Masyarakat (pileg & pilpres)	Partisipasi pemilih dalam pileg
			Partisipasi pemilih dalam pilpres
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (konteks aduan masyarakat)	Cakupan lembaga kemasyarakatan dan organisasi yang mendapatkan pembinaan pembangunan
6	Sosial	Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Persentase komunitas adat terpencil (KAT) yang dibina
		Program Penanggulangan Korban Bencana Sosial	Persentase korban bencana sosial yang menerima bantuan sosial
		Program rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana sosial	Cakupan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana sosial
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP dan SOP)
		Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang disabilitas yang telah menerima jaminan sosial
		Program Pemberdayaan Lanjut Usia	Persentase lanjut usia yang menjalankan usaha ekonomi produktif
		Program Pembinaan Panti Jompo	Persentase warga panti jompo yang menerima pembinaan
			Persentase lanjut usia terlanter yang telah menerima jaminan sosial
			Persentase lanjut usia terlanter yang telah menerima pembinaan
		Program Pembinaan Anak Terlanter	Persentase anak terlanter yang menerima pembinaan
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Cakupan eks penyandang penyakit sosial yang menerima pembinaan

		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan organisasi kesejahteraan sosial yang mendapatkan pembinaan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar			
1	Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah wirausahawan baru
		Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan
		Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
		Pembinaan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan (jabatan politik dan publik)	Rasio perempuan terhadap laki-laki pada lembaga legislatif
			Rasio PNS perempuan terhadap PNS laki-laki
			Rasio pejabat struktural perempuan terhadap pejabat struktural laki-laki
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (kekerasan perempuan)	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani
		Program Peningkatan Peran serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor formal non pertanian
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase lembaga pengarusutamaan gender yang mendapatkan pembinaan
			Persentase SKPD yang menyusun PPRG
			Perda Pengarusutamaan gender ditetapkan
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (kekerasan anak)	Persentase kasus kekerasan anak yang ditangani
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (layak anak)	Kabupaten Layak Anak (%)
3	Lingkungan Hidup	Pengendalian Sehat Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
		Peningkatan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana kelistrikan	Rasio elektrifikasi
		Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Cakupan ibukota kecamatan yang memiliki fasilitas pengelolaan sampah
			Jumlah rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri
		Pengelolaan areal pemakaman	Persentase areal pemakaman dalam kondisi baik
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase RTH yang dalam kondisi baik
		Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Nilai status lingkungan hidup daerah
			Laju deforestasi

			Persentase sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata
			Jumlah emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan di areal APL (juta ton CO2 eq)
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase kecamatan yang sudah terlayani pengelolaan persampahan
		Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Persentase luasan kawasan lindung terhadap luasan kabupaten
		Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase peningkatan luas area DAS yang terkonvrservasi
			Persentase luas HCV dalam kawasan izin pemanfaatan lahan
		Pengelolaan TAHURA	Tingkat kelestarian TAHURA
4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penataan administrasi kependudukan (e-KTP)	Cakupan penduduk yang sudah terdaftar dan mempunyai e-KTP
			Rasio penduduk yang berkartu keluarga per satuan penduduk
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Cakupan desa yang menjalankan musrenbang
			Persentase desa yang telah menyusun APBDes sesuai ketentuan
			Persentase desa yang melaporkan dokumen APBDes tepat waktu
		Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase desa yang melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan desa yang menjalankan Musrenbang sesuai ketentuan perundangan (%)
		Program Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemdes	Persentase desa yang melaporkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan yang berlaku
6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif
			Persentase ketersediaan sumber daya
			Persentase penurunan kehamilan tidak diinginkan dari WUS
			Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS
		Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Cakupan sekolah yang mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba dan PMS
		Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase remaja yang ikut dalam program GenRe (Generasi Berencana)
		Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Persentase Posyandu PADU
			Persentase keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia yang ikut program BKB, BKR dan BKL
7	Perhubungan	Pembangunan sarana dan prasarana perubungan	Persentase terminal bus/angkutan dalam kondisi baik
			Persentase halte angkutan dalam kondisi baik

		Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik
		Peningkatan pelayanan angkutan	Persentase angkutan umum dalam kondisi baik
		Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase jalan kabupaten yang memiliki rambu lalu lintas
		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan layak operasi
8	Komunikasi & Informasi	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Jumlah jaringan komunikasi
			Publikasi informasi daerah di media massa cetak
			Persentase desa yang bisa mengakses internet
		Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah media cetak yang memuat informasi pembangunan daerah
		Pengembangan kelembagaan keterbukaan informasi	Berfungsinya PPID
			Persentase SKPD yang telah membentuk dan menjalankan PPID pembantu
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah
9	Koperasi dan UKM	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif
		Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Cakupan UMKM yang diberdayakan
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Cakupan produk UMKM yang mendapatkan permodalan
			Media promosi bagi UMKM
		Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor IKM (%)
		Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Kontribusi industri kecil menengah terhadap PDRB (%)
10	Penanaman Modal	Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase pertumbuhan kinerja investasi
		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan investasi PMA
			Persentase peningkatan investasi PMDN
		Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tingkat kemudahan proses perijinan
11	Pemuda dan Olah Raga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar (unit)
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan olahraga	Peringkat pekan olahraga pelajar tingkat provinsi
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Cakupan pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (orang)
12	Statistik	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi
13	Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	Perda pengakuan dan revitalasi nilai budaya (Kecamatan)
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah festival budaya yang diikuti (kali)
14	Kearsipan	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	SKPD yang menerapkan arsip secara baku
		Penyelamatan dan pelestarian dokumen	Dokumen terselamatkan

		Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan	Database arsip daerah
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah layanan informasi arsip
Urusan Pilihan			
15	Kelautan dan Perikanan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan	Cakupan masyarakat perikanan yang diberdayakan
		Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Luas kawasan budidaya perikanan
		Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya
		Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap
		Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (Kualitas Produk)	Persentase produk perikanan yang memiliki standarisasi mutu
		Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (sentra produksi)	Jumlah produk olahan hasil perikanan
16	Pariwisata	Pengembangan Kemitraan	Persentase lembaga mitra yang aktif bekerjasama
		Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan
		Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah media pemasaran pariwisata pemerintah daerah
18	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Cakupan pendampingan dan penyuluhan (pertanian dalam arti luas)
		Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Tanaman Pangan)	Luas Lahan yang menghasilkan produksi pertanian
		Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Ketersediaan pangan utama pertanian
		Peningkatan Penarapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian guna meningkatkan produksi
		Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Khusus Perkebunan)	Luas lahan yang menghasilkan produksi perkebunan
		Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (Kualitas Produksi Pertanian)	Persentase kelompok petani yang menerapkan teknologi pertanian guna meningkatkan kualitas produk
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan (Sentra Produksi Pertanian)	Persentase produk Pertanian yang memiliki standarisasi mutu
		Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (khusus Perkebunan)	Tingkat Penggunaan Teknologi Terapan Perkebunan
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan (Sentra Produksi Perkebunan)	Persentase produk perkebunan yang memiliki standarisasi mutu
		Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase peningkatan pendapatan rata-rata petani
		Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Kelompok peternak yang menerapkan teknologi peternakan
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rasio populasi ternak yang sehat terhadap jumlah ternak
		Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Cakupan kelompok peternak yang diberdayakan
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan (Kualitas Produk)	Persentase produk peternakan yang memiliki standarisasi mutu

		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan (sentra produksi)	Persentase produk peternakan yang memiliki standarisasi mutu
19	Perdagangan	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah peningkatan jumlah pasar tradisional
			Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
		Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase pedagang yang menempati lokasi sesuai ijin
			Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mendapatkan pembinaan
		Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UMKM yang mendapatkan kredit perbankan
20	Transmigrasi	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi
Urusan Penunjang			
1	Penunjang Lainnya	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)	Persentase SKPD yang terlayani
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)	Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur
2	Perencanaan	Program Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Cakupan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang sudah memiliki payung hukum (kawasan)
		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Capaian pengembangan kota menengah dan besar (persen)
		Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD)	Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan
		Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Khusus Bappeda)	Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Khusus Bappeda)	Persentase aparatur perencana yang memiliki kompetensi perencana
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Khusus Bappeda)	Peringkat Pangripta
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Capaian pembangunan bidang ekonomi
		Program Perencanaan Sosial Budaya	Capaian pembangunan bidang sosial budaya
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Capaian pembangunan bidang prasarana wilayah dan SDA
3	Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)	Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD)	Persentase SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai standar
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan

		Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)	Tingkat maturitas SPIP (Level)
		Program Manajemen Aset Daerah	Cakupan aset daerah yang dikelola secara baik (persen)
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Pendapatan)	Persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan
4	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Program Fasilitasi dan Dukungan Kelembagaan KORPRI	Jumlah anggota KORPRI yang mendapat fasilitasi dan layanan yang disediakan KORPRI
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Khusus BKD)	Persentase penetapan pejabat struktural berdasarkan hasil seleksi jabatan/assessment
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Khusus BKD)	Cakupan penerapan seleksi ASN berbasis komputer
5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sistem penjangkauan aspirasi masyarakat efektif (jumlah kali reses)
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Sistem informasi pelayanan pengaduan masyarakat
6	Sekretariat Daerah	Program Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan yang dirumuskan
		Program Koordinasi Bidang Pemerintahan	Jumlah koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan
		Program Koordinasi Bidang Administrasi Umum	Jumlah Koordinasi Bidang Administrasi Umum yang dilaksanakan
		Program Pelayanan Administrasi Bidang Pemerintahan	Jumlah pelayanan administrasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan (kegiatan)
		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persentase batas wilayah antar daerah dan antar kecamatan/kelurahan yang ditetapkan
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan (Perda, Perbup, Intruksi, SK Bupati)
		Program Pelayanan Administrasi Bidang Administrasi Umum	Jumlah Pelayanan Administrasi Bidang Administrasi Umum yang dilaksanakan (kegiatan)
		Program Pengembangan Standarisasi Pelayanan Publik (Ortal)	Persentase SKPD yang telah merumuskan dan melaksanakan standar pelayanan publik (SPP)
		Program Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian, Pembangunan & Kesra	Jumlah Kebijakan Bidang Perekonomian, Pembangunan & Kesra yang dirumuskan
		Program Koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan & Kesra	Jumlah koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan & Kesra yang dilaksanakan
		Program Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik

		Program Pelayanan Administrasi Bidang Perekonomian, Pembangunan & Kesra	Jumlah Pelayanan Administrasi Bidang Perekonomian, Pembangunan & Kesra yang dilaksanakan (kegiatan)
7	Inspektorat	Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kasus korupsi yang telah diputus secara hukum
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase kasus pengaduan/temuan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah yang ditindaklanjuti
8	Kecamatan	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik
		Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkoordinasikan dengan baik
		Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terkoordinasikan dengan baik
		Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah kegiatan Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang terkoordinasikan dengan baik
		Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya yang terkoordinasikan dengan baik
		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa
		Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terkoordinasikan dengan baik

2.3 Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD kedalam APBD Tahun 2019

Pengendalian dan evaluasi RKPD dilakukan untuk memastikan bahwa RKPD telah dijadikan sebagai dasar penyusunan APBD. Berdasarkan data dan informasi dari dokumen yang tersedia, dapat diuraikan perbandingan jumlah dan pagu program, serta jumlah kegiatan, konsistensi indikator dan target kegiatan, antara RKPD dan APBD Kabupaten Paser Semester II Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel. 2.2
KONSISTENSI PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD DAN APBD
KABUPATEN PASER TAHUN 2019
(Menurut Urusan)

KODE. REK	URUSAN	JUMLAH PROGRAM					PAGU PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN				
		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak Sesuai di		RKPD	APBD	Selisih = (9 - 8)	RKPD	APBD	Sesuai	Tidak Sesuai di	
					RKPD	APBD							RKPD	APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	49	55	46	3	9	549.363.420.358,44	1.366.667.911.900,00	817.304.491.541,56	255	237	234	21	3
1.01	Pendidikan	5	6	5	0	1	128.210.624.489,58	167.604.362.335,49	39.393.737.845,91	76	70	70	6	0
1.02	Kesehatan	14	13	13	1	0	153.723.531.411,86	187.872.441.893,51	34.148.910.481,65	43	44	43	0	1
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16	14	14	2	0	81.795.675.000,00	913.779.609.995,00	831.983.934.995,00	45	43	42	3	1
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4	8	4	0	4	170.647.577.056,00	80.427.155.018,00	(90.220.422.038,00)	25	22	22	3	0
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	4	5	4	0	1	10.802.338.780,00	12.865.434.137,00	2.063.095.357,00	36	33	32	4	1
1.06	Sosial	6	9	6	0	3	4.183.673.621,00	4.118.908.521,00	(64.765.100,00)	30	25	25	5	0
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	65	59	57	8	2	132.664.376.779,48	93.583.087.609,00	(39.081.289.170,48)	313	274	269	45	5
2.01	Tenaga Kerja	3	3	3	0	0	2.209.231.264,00	2.494.375.110,00	285.143.846,00	13	14	13	0	1

2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	4	4	1	0	2.044.456.600,00	1.864.116.598,00	(180.340.002,00)	17	13	13	4	0
2.03	Pangan	3	3	3	0	0	8.130.392.462,70	3.901.038.970,00	(4.229.353.492,70)	12	12	12	0	0
2.04	Pertanahan	2	1	1	1	0	116.299.200,00	343.038.000,00	226.738.800,00	2	1	1	1	0
2.05	Lingkungan Hidup	4	5	4	0	1	16.420.070.587,00	18.422.790.660,00	2.002.720.073,00	47	39	38	9	1
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	1	1	1	0	0	10.488.976.800,00	7.238.778.443,00	(3.250.198.357,00)	29	28	28	1	0
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	4	4	4	0	0	8.291.972.160,88	6.874.688.230,00	(1.417.283.930,88)	50	51	50	0	1
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	4	4	1	0	17.820.829.000,00	4.592.046.800,00	(13.228.782.200,00)	21	19	19	3	0
2.09	Perhubungan	4	5	4	0	1	21.483.717.075,00	16.586.471.000,00	(4.897.246.075,00)	15	16	15	0	1
2.10	Komunikasi dan Informatika	6	6	6	0	0	33.362.435.671,90	13.467.043.100,00	(19.895.392.571,90)	29	27	27	2	0
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	4	4	2	0	775.410.000,00	591.448.000,00	(183.962.000,00)	5	5	5	0	0
2.12	Penanaman Modal	3	3	3	0	0	3.012.945.400,00	3.020.515.615,00	7.570.215,00	15	16	15	0	1
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	8	7	7	1	0	4.539.080.800,00	6.651.519.857,00	2.112.439.057,00	14	12	12	2	0
2.14	Statistik	3	2	2	1	0	642.637.458,00	1.374.719.200,00	732.081.742,00	26	5	5	21	0
2.16	Kebudayaan	2	2	2	0	0	2.141.152.400,00	2.438.158.376,00	297.005.976,00	8	7	7	1	0
2.17	Perpustakaan	1	1	1	0	0	550.065.250,00	2.905.525.550,00	2.355.460.300,00	5	5	5	0	0
2.18	Kearsipan	5	4	4	1	0	634.704.650,00	816.814.100,00	182.109.450,00	5	4	4	1	0
3	URUSAN PILIHAN	27	23	23	4	0	245.355.503.731,73	150.842.702.407,00	(94.512.801.324,73)	167	149	124	19	1
3.01	Kelautan dan Perikanan	6	5	5	1	0	15.739.061.370,00	8.157.177.477,00	(7.581.883.893,00)	29	24	24	5	0
3.02	Pariwisata	3	2	2	1	0	1.377.962.000,00	768.615.600,00	(609.346.400,00)	7	3	3	4	0
3.03	Pertanian	10	9	9	1	0	27.827.706.111,00	20.288.557.373,00	(7.539.148.738,00)	78	70	70	8	0

3.04	Kehutanan	1	1	1	0	0	186.791.436.037,68	107.937.866.053,00	(78.853.569.984,68)	24	24			
3.06	Perdagangan	4	3	3	1	0	10.048.177.800,00	10.897.338.400,00	849.160.600,00	19	17	17	2	0
3.07	Perindustrian	2	2	2	0	0	2.417.336.213,05	1.943.064.104,00	(474.272.109,05)	5	6	5	0	1
3.08	Transmigrasi	1	1	1	0	0	1.153.824.200,00	850.083.400,00	(303.740.800,00)	5	5	5	0	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG	31	26	25	6	1	156.625.222.595,10	152.189.849.834,00	(4.435.372.761,10)	366	302	299	67	3
4.01	Administrasi Pemerintahan	6	5	5	1	0	111.217.406.763,23	84.388.080.273,00	(26.829.326.490,23)	181	177	175	6	2
4.02	Pengawasan	5	4	4	1	0	2.246.806.650,00	5.542.528.080,00	3.295.721.430,00	55	22	22	33	0
4.03	Perencanaan	11	10	10	1	0	15.399.075.820,00	15.178.744.146,00	(220.331.674,00)	44	43	43	1	0
4.04	Kuangan	5	4	3	2	1	12.109.403.861,87	31.800.995.835,00	19.691.591.973,13	75	52	51	24	1
4.05	Kepegawaian	3	2	2	1	0	15.635.941.500,00	15.275.171.500,00	(360.770.000,00)	10	7	7	3	0
4.07	Penelitian dan Pengembangan	1	1	1	0	0	16.588.000,00	4.330.000,00	(12.258.000,00)	1	1	1	0	0
		172	163	151	21	12	1.084.008.523.464,75	1.763.283.551.750,00	679.275.028.285,25	1101	962	926	152	12

Kolom 1 adalah nomor

1. urut SKPD.
2. Kolom 2 adalah nama SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
3. Kolom 3 memuat jumlah program pada RKPD bagi setiap SKPD dilingkungan Pemda Kabupaten Paser Tahun 2019
4. Kolom 4 memuat jumlah program pada APBD bagi setiap SKPD dilingkungan Pemda Kabupaten Paser Tahun 2015
5. Kolom 5 memuat hasil identifikasi terhadap jumlah program yang sama antara RKPD dan APBD Kabupaten Paser Tahun 2019 untuk setiap SKPD
6. Kolom 6 memuat jumlah program yang tidak konsisten antara RKPD dan APBD. Penghitungan dilakukan dengan menambahkan jumlah program pada RKPD yang tidak ada dalam APBD dengan jumlah program dalam APBD yang tidak ada dalam RKPD
7. Kolom 7 memuat jumlah pagu dari seluruh program pada SKPD yang bersangkutan dalam RKPD.
8. Kolom 8 memuat jumlah pagu dari seluruh program pada SKPD yang bersangkutan dalam APBD (setelah perubahan).
9. Kolom 9 memuat selisih antara pagu APBD dikurangi dengan pagu RKPD.
10. Kolom 10 memuat jumlah kegiatan dari seluruh program dalam RKPD.
11. Kolom 11 memuat jumlah kegiatan dari seluruh program dalam APBD
12. Kolom 12 memuat jumlah kegiatan yang sama antara RKPD dan APBD.
13. Kolom 13 memuat jumlah kegiatan yang tidak konsisten antara RKPD dan APBD. Penghitungan dilakukan dengan menambahkan jumlah kegiatan pada RKPD yang tidak ada dalam APBD dengan jumlah kegiatan dalam APBD yang tidak ada dalam RKPD
14. Kolom 14 memuat jumlah kegiatan dalam Renja SKPD Tahun 2019 yang tidak ada dalam Renstra SKPD Tahun 2016-2021.

2.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2019

Sebagaimana visi Kabupaten Paser yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”. Untuk merealisasi visi tersebut, maka di dalam RPJMD telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Paser sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman.
2. Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
3. Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
5. Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya, dan Adat Istiadat Lokal.

Berdasarkan dari misi pembangunan tersebut selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan.

Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman	
Tujuan	Sasaran
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan transportasi publik	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
	Meningkatnya pelayanan transportasi publik
	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan
Meningkatkan akses jaringan komunikasi	Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi
	Meningkatnya jangkauan jaringan internet
Meningkatkan akses air bersih	Meningkatnya akses Air Bersih
Mengembangkan infrastruktur pemukiman rakyat	Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana
	Meningkatnya kualitas pemukiman masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan	
Meningkatkan akses pelayanan pendidikan	Meningkatnya angka partisipasi siswa usia sekolah
	Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini
	Meningkatnya Angka Melek Huruf
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Memperkuat pelayanan pendidikan yang berdaya saing	Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan primer
	Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga
Memperkuat pelayanan Kesehatan yang berdaya saing	Berkembangnya pelayanan kesehatan yang berdaya saing
Misi 3 : Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan	
Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
	Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan	Berkembangnya sektor pariwisata
Meningkatkan kinerja pasar tradisional, koperasi dan UMKM	Meningkatnya kinerja UMKM
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional
	Meningkatnya koperasi aktif
	Meningkatnya kinerja Industri Kecil Menengah
	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja
	Meningkatnya kinerja BUMDes
Meningkatkan iklim investasi	Meningkatnya investasi
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup
	Meningkatnya kualitas kawasan konservasi
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
	Meningkatnya akses terhadap pelayanan publik
Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran
	Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya
Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat
Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan	Meningkatnya partisipasi publik
Misi 5 : Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya dan Adat Istiadat Lokal	
Meningkatkan rekognisi dan promosi	Meningkatnya akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan
	Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan
	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
	Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan
Meningkatkan stabilitas sosial	Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban masyarakat
	Meningkatnya akses bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana sosial
	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam
	Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat
	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan
	Meningkatnya pemenuhan hak anak
Meningkatkan pengelolaan kependudukan	Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui
	Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi

BAB III

KINERJA RKPD KABUPATEN PASER TAHUN 2019

3.1 Kinerja RKPD Kabupaten Paser Tahun 2019

Pengendalian dan Evaluasi dimaksudkan untuk lebih memperjelas dan mempermudah arah serta pelaksanaan program-program pembangunan sehingga tepat sasaran dan mempermudah dalam melakukan pengawasan sehingga memperkecil kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan meliputi :

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD)
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD)
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD)

Evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lingkup Kabupaten Paser. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan Bupati dalam mewujudkan :

1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah
2. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan di Kabupaten Paser dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan

Adapun Kinerja RKPD Semester II Tahun 2019 atau Realisasi Kinerja Triwulan IV yang dilaksanakan hingga sampai dengan periode 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 (Semester II)

No	Urusan/Bidang	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD	
				Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.366.667.911.900,00	1.302.844.321.813,80	89,44	95,33	Tinggi	Sangat Tinggi
1.01	Pendidikan	167.604.362.335,49	158.325.783.198,40	91,12	94,46	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
1.02	Kesehatan	187.872.441.893,51	161.171.497.459,40	91,00	85,79	Sangat Tinggi	Tinggi
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	913.779.609.995,00	888.429.567.349,00	95,04	97,23	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	80.427.155.018,00	78.430.582.350,00	81,21	97,52	Tinggi	Sangat Tinggi
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	12.865.434.137,00	12.597.646.530,00	84,32	97,92	Tinggi	Sangat Tinggi
1.06	Sosial	4.118.908.521,00	3.889.244.927,00	93,94	94,42	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	93.583.087.609,00	87.789.564.813,97	92,92	93,81	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.01	Tenaga Kerja	2.494.375.110,00	2.427.737.594,00	97,06	97,33	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.864.116.598,00	1.760.188.168,00	93,28	94,42	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.03	Pangan	3.901.038.970,00	3.646.223.038,00	86,61	93,47	Tinggi	Sangat Tinggi
2.04	Pertanahan	343.038.000,00	340.286.746,00	100,00	99,20	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.05	Lingkungan Hidup	18.422.790.660,00	17.877.793.315,00	95,27	97,04	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	7.238.778.443,00	6.629.812.874,00	97,27	91,59	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.874.688.230,00	6.578.728.188,00	99,44	95,69	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.592.046.800,00	4.200.782.296,00	98,11	91,48	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.09	Perhubungan	16.586.471.000,00	14.589.704.549,00	72,69	87,96	Sedang	Tinggi
2.10	Komunikasi dan Informatika	13.467.043.100,00	13.048.840.743,97	100,00	96,89	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	591.448.000,00	570.031.141,00	100,00	96,38	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.12	Penanaman Modal	3.020.515.615,00	2.784.016.770,00	95,01	92,17	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	6.651.519.857,00	6.383.213.620,00	99,61	95,97	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.14	Statistik	1.374.719.200,00	1.329.658.849,00	96,00	96,72	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.16	Kebudayaan	2.438.158.376,00	2.119.563.450,00	80,00	86,93	Tinggi	Tinggi
2.17	Perpustakaan	2.905.525.550,00	2.764.223.705,00	84,95	95,14	Tinggi	Sangat Tinggi
2.18	Kearsipan	816.814.100,00	738.759.767,00	84,38	90,44	Tinggi	Tinggi

3	Urusan Pilihan	150.842.702.407,00	47.520.670.139,00	89,16	82,39	Tinggi	Tinggi
3.01	Kelautan dan Perikanan	8.157.177.477,00	7.006.670.329,00	84,08	85,90	Tinggi	Tinggi
3.02	Pariwisata	768.615.600,00	744.619.333,00	100,00	96,88	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3.03	Pertanian	20.288.557.373,00	19.537.026.063,00	82,84	96,30	Tinggi	Sangat Tinggi
3.04	Kehutanan	107.937.866.053,00	7.158.655.160,00	70,20	6,63	Sedang	Sangat Rendah
3.06	Perdagangan	10.897.338.400,00	10.336.879.738,00	93,93	94,86	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3.07	Perindustrian	1.943.064.104,00	1.900.314.075,00	93,06	97,80	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3.08	Transmigrasi	850.083.400,00	836.505.441,00	100,00	98,40	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	152.189.849.834,00	139.979.970.250,00	93,85	91,98	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4.01	Administrasi Pemerintahan	84.388.080.273,00	76.275.871.812,00	97,80	90,39	Sangat Tinggi	Tinggi
4.02	Pengawasan	5.542.528.080,00	5.271.018.350,00	81,72	95,10	Tinggi	Sangat Tinggi
4.03	Perencanaan	15.178.744.146,00	14.521.762.928,00	90,20	95,67	Tinggi	Sangat Tinggi
4.04	Keuangan	31.800.995.835,00	29.413.582.567,00	98,70	92,49	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4.05	Kepegawaian	15.275.171.500,00	14.493.404.593,00	96,14	94,88	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4.07	Penelitian dan Pengembangan	4.330.000,00	4.330.000,00	98,52	100,00	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	JUMLAH	1.763.283.551.750,00	1.578.134.527.016,77	91,34	89,50	Sangat Tinggi	Tinggi

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan untuk tahun 2019 diarahkan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Tahun 2019 yaitu meningkatnya angka partisipasi siswa sekolah, meningkatnya angka partisipasi anak usia dini, meningkatnya angka Melek Huruf, Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dan Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing.

Urusan Pendidikan Kabupaten Paser pada tahun 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 167.604.362.335,49 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 158.325.783.198,00 atau 94,46%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Camat Tanah Grogot, Kantor Camat

Long Ikis, Kantor Camat Long Kali, Kantor Camat Batu Sopang, Kantor Camat Muara Komam dan Kantor Camat Muara Samu. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Pendidikan Anak Usia Dini*
2. *Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun*
3. *Program Pendidikan Non Formal*
4. *Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan*
5. *Program Manajemen Pelayanan Pendidikan*

2. Urusan Kesehatan

Peningkatan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan, karena faktor kesehatan menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu pembangunan kesehatan sangat terkait dan dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti demografi dan kependudukan, keadaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk tingkat pendidikan, keadaan lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan biologi. Urusan Wajib Kesehatan untuk tahun 2019 diarahkan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan tahun 2019 yaitu meningkatnya pelayanan kesehatan primer, meningkatnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat dan Berkembangnya pelayanan kesehatan yang berdaya saing.

Secara keseluruhan Urusan Kesehatan pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 187.872.441.893,51 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 161.171.497.459,00 atau 85,79%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Kantor Camat Tanah Grogot, Kantor Camat Long Ikis, Kantor Camat Long Kali, Kantor Camat Batu Sopang dan Kantor Camat Muara Komam. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Obat dan Perbekalan Kesehatan*

2. *Program Upaya Kesehatan Masyarakat*
3. *Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat*
4. *Program Pengembangan Lingkungan Sehat*
5. *Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular*
6. *Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan*
7. *Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya*
8. *Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita*
9. *Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak*
10. *Program Pemerataan Tenaga Kesehatan*
11. *Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD*
12. *Program Perbaikan Gizi Masyarakat*
13. *Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Kb*
14. *Program Pengawasan Obat dan Makanan*
15. *Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan*
16. *Program Upaya Kesehatan Sekolah*

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur merupakan keperluan mendasar untuk peningkatan ekonomi di suatu daerah, oleh karena itu pembangunan infrastruktur harus terus dilaksanakan untuk mendukung perekonomian di daerah. Urusan Wajib Pekerjaan Umum untuk tahun 2019 diarahkan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Tahun 2019 yaitu meningkatnya akses Air Bersih dan Terpenuhinya sarana dan prasarana umum penunjang pembangunan secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah yang diupayakan melalui peningkatan pembangunan Infrastruktur Daerah pada sasaran Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan. Akses untuk menuju tempat pelayanan publik dari desa ke kota di Kabupaten Paser telah terhubung dengan jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah, baik berupa jalan raya maupun jembatan. Hal ini untuk menunjang akses pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten

Paser. Namun demikian, kondisinya masih kurang memadai pada sisi jalan raya.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 913.779.609.995,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 888.429.567.349,00 atau 97,23%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang, Kantor Camat Tanah Grogot, Kantor Camat Pasir Belengkong, Kantor Camat Kuaro, Kantor Camat Long Ikis, Kantor Camat Batu Sopang, Kantor Camat Muara Komam, Kantor Camat Muara Samu dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program pembangunan jalan dan jembatan*
2. *Program pembangunan turap/talud/bronjong*
3. *Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan*
4. *Program tanggap darurat jalan dan jembatan*
5. *Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan*
6. *Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya*
7. *Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya*
8. *Program Pengendalian Banjir*
9. *Program Perencanaan Teknis Ke-PU- an*
10. *Program Perencanaan Tata Ruang*
11. *Program Pemanfaatan Ruang*
12. *Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang*
13. *Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan*
14. *Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah*
15. *Program pembangunan infrastruktur perdesaan*

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Wajib Perumahan untuk tahun 2019 diarahkan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Tahun 2019 yaitu Terpenuhinya sarana dan prasarana umum penunjang pembangunan secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah yang diupayakan melalui peningkatan pembangunan Infrastruktur Daerah pada sasaran Penataan dan Rehabilitasi Kawasan Permukiman.

Analisa kinerja atas layanan urusan perumahan untuk Kabupaten Paser mengacu pada tingkat ketersediaan pasokan listrik pada rumah tangga. Hal tersebut digunakan sebagai indikator besarnya kebutuhan pasokan listrik yang akan ditargetkan pemenuhannya dalam jangka lima tahun RPJMD ini.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.427.155.018,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.430.582.350,00 atau 97,52%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kantor Camat Long Ikis, Kantor Camat Muara Komam, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Sosial. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Pengembangan Perumahan*
2. *Program Lingkungan Sehat Perumahan*
3. *Program pengelolaan areal pemakaman*
4. *Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik*
5. *Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan serta Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara*

6. *Program Pengawasan dan Pengendalian serta Pengelolaan Bangunan dan Lingkungan Permukiman*
7. *Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman*
8. *Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran*
9. *Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan*

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.865.434.137,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.597.646.530,00 atau 97,92%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019.

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Camat Tanah Grogot, Kantor Camat Pasir Belengkong, Kantor Camat Kuaro, Kantor Camat Long Ikis, Kantor Camat Batu Sopang, Kantor Camat Muara Komam, Kantor Camat Batu Engau, Kantor Camat Tanjung Harapan dan Kantor Camat Muara Samu. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan*
2. *Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal*
3. *Program pengembangan wawasan kebangsaan*
4. *Program pendidikan politik masyarakat*
5. *Program Peningkatan Kesiagaan dan Tanggap Darurat Bencana*
6. *Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana*
7. *Program Pencegahan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana*
8. *Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*

6. Urusan Sosial

Urusan Sosial pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.118.908.521,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.889.224.927,00 atau 94,42%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan Sosial tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Sekretariat Daerah. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya*
2. *Program pembinaan anak terlantar*
3. *Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma*
4. *Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)*
5. *Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial*
6. *Program Penanggulangan Korban Bencana Sosial*
7. *Program pembinaan panti asuhan /panti jompo*

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.494.375.110,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.427.737.594,00 atau 97,33%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Paser. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan Kesempatan Kerja*
2. *Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Lembaga ketenagakerjaan*
3. *Program Penempatan Tenaga Kerja*
4. *Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja*

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.864.116.598,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.760.188.168,00 atau 94,42%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan*
2. *Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak*
3. *Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan*
4. *Peningkatan peran perempuan di pedesaan*

3. Urusan Pangan

Urusan Pangan pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.901.038.970,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.646.223.038,00 atau 93,47%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)*
2. *Program pengembangan budidaya perikanan*
3. *Program peningkatan produksi hasil peternakan*

4. Urusan Pertanian

Urusan pertanian pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 343.038.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan

realisasi keuangan sebesar Rp. 340.286.746,00 atau 99,20%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2019. Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

5. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.422.790.660,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.877.793.315,00 atau 97,04%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut dilaksanakan bersama oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Camat Long Kali, Kantor Camat Muara Komam dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)*
2. *Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan*
3. *Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*
4. *Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam*

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.238.778.443,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.629.812.874,00 atau 91,59%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kantor Camat di Kabupaten Paser. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
2. Program Pengawasan dan Penegakan Peraturan Kependudukan

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.874.688.230,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.578.728.188,00 atau 95,69%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta seluruh Kantor Camat di Kabupaten Paser. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan*
2. *Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan*
3. *Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*
4. *Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa*
5. *Penataan Lembaga Kemasyarakatan*
6. *Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa*
7. *Program Pengelolaan Sumber Daya Desa dan Pengembangan TTG*
8. *Program Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemdes*
9. *Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat*
10. *Program peningkatan peran perempuan di perdesaan*

8. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.592.046.800,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.200.782.296,00 atau 91,48%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Keluarga Berencana*
2. *Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR*
3. *Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU*
4. *Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS*

9. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.586.471.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.589.704.549,00 atau 87,96%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Paser. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan*
2. *Program peningkatan pelayanan angkutan*
3. *Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan*
4. *Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas*
5. *Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor*

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.467.043.100,00 sampai dengan 30 Juni 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.048.840.744,00 atau 96,89%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Badan Pendapatan Daerah. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa*
2. *Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi*

3. *Program kerjasama informasi dengan mas media*
4. *Program Pengembangan Data/Informasi*

11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan UKM pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 591.448.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 570.031.141,00 atau 96,38%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusantersebut dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi,Usaha Kecildan Menengah. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif*
2. *Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah*
3. *Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah*
4. *Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.*

12. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.020.515.615,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.784.016.770,00 atau 92,17%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusantersebut diselenggarakan oleh dinas Penanaman Modal dan Pelayanan PerijinanTerpadu dan Sekretariat Daerah. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi*
2. *Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah*
3. *Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi*

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.651.519.857,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.383.213.620,00 atau 95,97%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Kantor Camat Batu Engaudan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga*
2. *Program peningkatan peran serta kepemudaan*
3. *Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba*
4. *Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga*
5. *Program Pengembangan Kemitraan*
6. *Program Pengembangan Destinasi Pariwisata*
7. *Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata*

14. Urusan Statistik

Urusan Statistik pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.374.719.200,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.329.658.849,00 atau 96,72%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian, Badan Penanggulangan Bencana daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program pengembangan data/informasi/statistik daerah*
2. *Program Pengembangan Data/Informasi*

15. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.438.158.376,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.119.563.450,00 atau 86,93%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun Program Program pada APBD 2019 adalah :

1. *Program Pengembangan Nilai Budaya*
2. *Program Pengelolaan Keragaman Budaya*

16. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.905.525.550,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.764.223.705,00 atau 95,14%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

17. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 816.814.100,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 738.759.767,00 atau 90,44%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program perbaikan sistem administrasi kearsipan*
2. *Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan*
3. *Program peningkatan kualitas pelayanan informasi*

C. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.157.177.477,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.006.670.329,00 atau 85,90%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program pengembangan perikanan tangkap*
2. *Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan*
3. *Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar*
4. *Program Pengembangan Perencanaan, Data dan Informasi Kelautan, Perikanan dan Peternakan*
5. *Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan/Perikanan/Peternakan dan Wawasan Lingkungan Kepada Masyarakat*

2. Urusan Pariwisata

Urusan Pilihan Pariwisata pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 768.615.600,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 744.619.333,00 atau 96,88%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Program pengembangan pemasaran pariwisata*
2. *Program Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata*

3. Urusan Pertanian

Urusan Pilihan Pertanian pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.288.557.373,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.537.026.063,00 atau 96,30%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan*
2. *Program Peningkatan Kesejahteraan Petani*
3. *Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan*
4. *Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan*
5. *Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan*
6. *Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan*
7. *Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak*
8. *Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner*
9. *Program Pengembangan Perencanaan, Data dan Informasi*

4. Urusan Kehutanan

Urusan Kehutanan pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 107.937.866.053,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.158.655.160,00 atau 6,63%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut diselenggarakan oleh dinas Lingkungan Hidup. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA*
2. *Program Pengelolaan Tahura*

5. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.897.338.400,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.336.879.738,00 atau 94,86%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri*
2. *Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan*
3. *Program Penyediaan Fasilitas Pasar*

6. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.943.064.104,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.900.314.075,00 atau 97,80%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi*
2. *Program pengembangan industri kecil dan menengah*
3. *Program Peningkatan dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelistrikan*

7. Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 850.083.400,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 836.505.441,00 atau 98,40%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

Sumber Daya Mineral. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi*

8. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.330.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan belum adanya realisasi keuangan Rp. 4.330.000,00 atau 100%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kuaro. Adapun Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*

D. Urusan Penunjang

1. Urusan Administrasi Pemerintahan

Urusan Administrasi Pemerintahan pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.388.080.273,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 76.275.871.812,00 atau 90,39%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut diselenggarakan oleh hampir semua SKPD di Kabupaten Paser yaitu Inspektorat Kabupaten, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, seluruh Kantor Camat, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perikanan, dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah serta Sekretariat Daerah. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah :

1. *Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)*
2. *Program Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah*
3. *Program Penataan Daerah Otonomi Baru*
4. *Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi*
5. *Program Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat*
6. *Program Koordinasi Bidang Perekonomian*
7. *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH*
8. *Pengawasan Jasa Konstruksi*
9. *Program Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik*
10. *Program Penataan Batas Daerah*
11. *Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah*
12. *Program Fasilitas dan Dukungan Kelembagaan KORPRI*
13. *Program Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan*
14. *Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan*
15. *Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur*
16. *Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya*
17. *Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*
18. *Program Pelayanan Administrasi Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan*
19. *Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah*
20. *Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum*

21. *Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*
22. *Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada*
23. *Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*
24. *Program Penanggulangan Masalah Sosial Ekonomi*

2. Urusan Pengawasan

Urusan Pengawasan pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.542.528.080,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.271.018.350,00 atau 95,10%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Paser. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH*
2. *Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)*
3. *Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN*

3. Urusan Perencanaan

Urusan Perencanaan pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.178.744.146,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.521.762.928,00 atau 95,67%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut diselenggarakan oleh Seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program pengembangan data/informasi*
2. *Program perencanaan pembangunan daerah*
3. *Program perencanaan pembangunan ekonomi*
4. *Program perencanaan sosial dan budaya*

5. *Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam*
6. *Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan*
7. *Program Penelitian dan Pengembangan (Litbang)*

4. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.800.995.835,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.413.582.567,00 atau 92,49%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusantersebut diselenggarakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah*
2. *Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota*
3. *Program Pengelolaan Aset Daerah*

5. Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.275.171.500,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.493.404.593,00 atau 94,88%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan Kapasitas dan Integritas Sumberdaya Aparatur*
2. *Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur*

6. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.330.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.330.000,00 atau 100,00%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, urusan tersebut diselenggarakan oleh Kantor Kecamatan Kuaro. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*

BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN PASER TAHUN 2019

4.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2019

Berikut di bawah ini adalah faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2019 :

No.	Nama SKPD	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tidak ada
2	DINAS KESEHATAN	Tidak ada
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Ketersediaan dana dan Personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan serta partisipasi masyarakat yang positif, dalam hal pelaksanaan kegiatan
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1. Dukungan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Paser 2. Adanya kerjasama yang baik dari semua pegawai di semua bidang 3. Adanya disiplin yang tinggi dari petugas lapangan karena disertai arahan tugas yang jelas dan sanksi yang tegas disamping perbaikan penghasilan dilakukan secara bertahap 4. Kerjasama yang baik antar instansi dan lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
5	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kerja sama yang baik sehingga maksimal dalam pencapaian keberhasilan kinerja
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tidak ada
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tidak ada
8	DINAS SOSIAL	Tidak ada
9	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Ketersediaan dana tepat waktu
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Program kerja yang terdapat dalam Renstra dan Renja secara umum telah sejalan

11	DINAS KETAHANAN PANGAN	Terjalinnnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antar bidang, sub bidang dan sekretariat
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tidak ada
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	Terjalinnnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan PD maupun instansi terkait lainnya
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Program kerja yang terdapat dalam Renstra dan Renja secara umum telah sejalan
15	DINAS PERHUBUNGAN	Terjalinnnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan PD maupun instansi terkait lainnya
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	ketersediaan dana tepat waktu
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Motivasi, Disiplin Kerja, Penghargaan terhadap Petugas WP dan Ketersediaan Dana
18	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak ada
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Ketersediaan dana tepat waktu
20	DINAS PERIKANAN	Tidak ada
21	DINAS PERTANIAN	Terjalinnnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan SKPD maupun instansi terkait lainnya
22	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Tidak ada
23	SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Ada
24	SEKRETARIAT DPRD	Tidak ada
25	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT	Tidak ada
26	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG	Tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur yang menunjang Kinerja Pegawai
27	KANTOR CAMAT KUARO	Terjalinnnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan SKPD maupun instansi terkait lainnya
28	KANTOR CAMAT LONG IKIS	Terjalinnnya koordinasi dan perencanaan yang baik
29	KANTOR CAMAT LONG KALI	Adanya komitmen bersama dalam penyelesaian program/kegiatan
30	KANTOR CAMAT BATU SOPANG	Tidak ada
31	KANTOR CAMAT MUARA KOMAM	Tidak ada
32	KANTOR CAMAT BATU ENGAU	Tidak ada
33	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN	Tidak ada

34	KANTOR CAMAT MUARA SAMU	Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan SKPD maupun instansi terkait lainnya
35	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	Terjalin koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan Perangkat Daerah maupun instansi terkait lainnya
36	INSPEKTORAT KABUPATEN	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta SDM yang cukup
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tidak ada
38	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tidak ada
39	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tidak ada
40	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Tidak ada

4.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2019

Berikut di bawah ini adalah faktor penghambat pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2019 :

No.	Nama SKPD	Faktor Penghambat
(1)	(2)	(3)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tidak ada
2	DINAS KESEHATAN	Tidak Ada
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Perencanaan dan fisik dilaksanakan pada tahun bersamaan
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1. Dana tersedia tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan 2. Menyesuaikan dengan Keperluan pada kegiatan tahun berjalan
5	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Beberapa Kegiatan belum dilaksanakan terkait pembagian anggaran kas
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tidak ada
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Adanya penurunan pagu anggaran kegiatan pada anggaran perubahan
8	DINAS SOSIAL	Tidak ada

9	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Mutasi Jabatan
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga berkurangnya target kinerja yang diharapkan 2. Pembagian Anggaran kas membatasi pelaksanaan kegiatan
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	Terjadinya perubahan susunan organisasi
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tidak ada
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Terdapat kesalahan rekening / Nomor kegiatan sehingga harus menunggu perubahan anggaran
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga berkurangnya target kinerja yang di harapkan
15	DINAS PERHUBUNGAN	Terdapat kesalahan rekening / nomenklatur kegiatan sehingga harus menunggu perubahan Anggaran
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Mutasi jabatan
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai 2. Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan bagi staf untuk meningkatkan profesionalisme
18	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak ada
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Keterbatasan waktu pelaksanaan
20	DINAS PERIKANAN	Tidak ada
21	DINAS PERTANIAN	Terdapat kesalahan rekening / nomenklatur kegiatan sehingga harus menunggu perubahan Anggaran
22	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Tidak ada
23	SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Ada
24	SEKRETARIAT DPRD	Tidak ada
25	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT	Tidak ada
26	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG	Menunggu Pengesahan Anggaran Perubahan SKPD Tahun 2019 sehingga harus menunggu sebelum dapat diproses pengerjaannya
27	KANTOR CAMAT KUARO	Tidak Ada
28	KANTOR CAMAT LONG IKIS	Terdapat perubahan rincian kegiatan sehingga harus menunggu perubahan anggaran

29	KANTOR CAMAT LONG KALI	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam operasional kegiatan
30	KANTOR CAMAT BATU SOPANG	Tidak ada
31	KANTOR CAMAT MUARA KOMAM	Tidak ada
32	KANTOR CAMAT BATU ENGAU	Tidak ada
33	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN	Tidak ada
34	KANTOR CAMAT MUARA SAMU	Tidak ada
35	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	Terdapat kesalahan kode rekening menunggu perubahan anggaran dan keterbatasan anggaran
36	INSPEKTORAT KABUPATEN	Kurang memadainya pendanaan kegiatan dan sarana.
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tidak ada
38	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tidak ada
39	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tidak ada
40	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Tidak ada

4.3 Tindak Lanjut

Berikut di bawah ini adalah Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD

Berikutnya :

No.	Nama SKPD	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tidak ada
2	DINAS KESEHATAN	Tidak Ada
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Kegiatan perencanaan dan fisik tidak dilakukan bersamaan
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Perbaiki Sistem Pengukuran Indikator Kinerja
5	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Merencanakan dan melaksanakan renja SKPD sesuai target yang ada dalam Renja SKPD
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tidak ada

7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Melaksanakan kegiatan yang lebih prioritas dengan dukungan anggaran yang ada
8	DINAS SOSIAL	Tidak ada
9	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Peningkatan Kinerja bidang untuk dapat meningkatkan daya serap dana dan anggaran
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perlunya penyelarasan Renstra SKPD dan Renja SKPD sehingga tujuan SKPD dapat Tercapai secara maksimal
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tidak ada
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapainya sinkronisasi antara Renstra dan Renja terhadap RKPD
15	DINAS PERHUBUNGAN	Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap, Peningkatan Kinerja bidang untuk dapat meningkatkan daya serap dana dan anggaran
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tidak ada
18	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak ada
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Peningkatan Kinerja bidang untuk dapat meningkatkan daya serap dana dan anggaran
20	DINAS PERIKANAN	Tidak ada
21	DINAS PERTANIAN	Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
22	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Tidak ada
23	SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Ada
24	SEKRETARIAT DPRD	Tidak ada
25	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT	Tidak ada
26	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG	Meningkatkan koordinasi dengan pihak ketiga agar dalam pengerjaan program/kegiatan pembangunan fisik dapat cepat diselesaikan
27	KANTOR CAMAT KUARO	Tidak Ada
28	KANTOR CAMAT LONG IKIS	Sesuaikan dan percepat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan

29	KANTOR CAMAT LONG KALI	Tidak ada
30	KANTOR CAMAT BATU SOPANG	Tidak ada
31	KANTOR CAMAT MUARA KOMAM	Tidak ada
32	KANTOR CAMAT BATU ENGAU	Tidak ada
33	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN	Tidak ada
34	KANTOR CAMAT MUARA SAMU	Tidak ada
35	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	Meningkatkan koordinasi secara internal untuk melakukan sebuah proses laporan keuangan agar cepat, tepat dan akurat sesuai prinsip-prinsip penatausahaan keuangan
36	INSPEKTORAT KABUPATEN	Adanya ketersediaan dana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan.
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tidak ada
38	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tidak ada
39	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tidak ada
40	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Tidak ada

4.4 Kebijakan Pelaksanaan RKPD Masa Yang Akan Datang

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait terhadap rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Percepatan Pelaksanaan kegiatan di lapangan dan mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang akan timbul dan tindak lanjut penyelesaiannya;
- Percepatan Penyerapan anggaran kegiatan yang telah selesai dilaksanakan;
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai.
- Adanya sinergitas antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
- Pelaksanaan RKPD harus sesuai dan konsisten dengan RPJMD dan Berpedoman pada RPJPD;
- Menjamin dan Memastikan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Dokumen RKPD;

- Melakukan Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

1. Konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran belum mendapat perhatian serius sehingga ada inkonsistensi antara RKPD dan APBD Tahun 2019 Kabupaten Paser, dimana konsistensi program mencapai 92,64% dan konsistensi kegiatan mencapai 96,26%.
2. Rata-rata capaian kinerja kegiatan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2019 sampai dengan Semester II untuk rata-rata realisasi anggaran kegiatan adalah **89,50 %** dengan predikat "**Tinggi**".
3. Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser belum tertib dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi sehingga data isian untuk hasil RKPD Kabupaten Paser masih belum sempurna.
4. Hasil evaluasi PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada Lampiran memberikan gambaran penyelenggaraan pemerintah daerah pada Tahun 2019.

5.2 Rekomendasi

1. Perlu ditingkatkan pemahaman dan kemampuan teknis aparatur pemerintah daerah terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui pelatihan yang berkelanjutan
2. Perangkat Daerah penanggung jawab program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
3. Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja rencana pembangunan perlu dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka menyusun kebijakan perencanaan dan penganggaran di masa-masa yang akan datang
4. Kementerian Dalam Negeri membuat kebijakan untuk memberikan punishment dan reward di bidang penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan daerah.

LAMPIRAN 1. EVALUASI HASIL SEMESTER II PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019 KABUPATEN PASER

KODE	URUSAN	KINERJA (%)	PREDIKAT KINERJA	PAGU APBD 2019 (Rp)	REALISASI ANGGARAN S/D SEMESTER I	
					(Rp)	(%)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	89,44	Tinggi	1.366.667.911.900,00	1.302.844.321.813,80	95,33
1.01	Pendidikan	91,12	Sangat Tinggi	167.604.362.335,49	158.325.783.198,40	94,46
1.02	Kesehatan	91,00	Sangat Tinggi	187.872.441.893,51	161.171.497.459,40	85,79
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95,04	Sangat Tinggi	913.779.609.995,00	888.429.567.349,00	97,23
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	81,21	Tinggi	80.427.155.018,00	78.430.582.350,00	97,52
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	84,32	Tinggi	12.865.434.137,00	12.597.646.530,00	97,92
1.06	Sosial	93,94	Sangat Tinggi	4.118.908.521,00	3.889.244.927,00	94,42
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	92,92	Sangat Tinggi	93.583.087.609,00	87.789.564.813,97	93,81
2.01	Tenaga Kerja	97,06	Sangat Tinggi	2.494.375.110,00	2.427.737.594,00	97,33
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	93,28	Sangat Tinggi	1.864.116.598,00	1.760.188.168,00	94,42
2.03	Pangan	86,61	Tinggi	3.901.038.970,00	3.646.223.038,00	93,47
2.04	Pertanahan	100,00	Sangat Tinggi	343.038.000,00	340.286.746,00	99,20
2.05	Lingkungan Hidup	95,27	Sangat Tinggi	18.422.790.660,00	17.877.793.315,00	97,04
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	97,27	Sangat Tinggi	7.238.778.443,00	6.629.812.874,00	91,59
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	99,44	Sangat Tinggi	6.874.688.230,00	6.578.728.188,00	95,69
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	98,11	Sangat Tinggi	4.592.046.800,00	4.200.782.296,00	91,48
2.09	Perhubungan	72,69	Sedang	16.586.471.000,00	14.589.704.549,00	87,96
2.10	Komunikasi dan Informatika	100,00	Sangat Tinggi	13.467.043.100,00	13.048.840.743,97	96,89
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100,00	Sangat Tinggi	591.448.000,00	570.031.141,00	96,38
2.12	Penanaman Modal	95,01	Sangat Tinggi	3.020.515.615,00	2.784.016.770,00	92,17
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	99,61	Sangat Tinggi	6.651.519.857,00	6.383.213.620,00	95,97
2.14	Statistik	96,00	Sangat Tinggi	1.374.719.200,00	1.329.658.849,00	96,72
2.16	Kebudayaan	80,00	Tinggi	2.438.158.376,00	2.119.563.450,00	86,93
2.17	Perpustakaan	84,95	Tinggi	2.905.525.550,00	2.764.223.705,00	95,14
2.18	Kearsipan	84,38	Tinggi	816.814.100,00	738.759.767,00	90,44
3	Urusan Pilihan	89,16	Tinggi	150.842.702.407,00	47.520.670.139,00	82,39
3.01	Kelautan dan Perikanan	84,08	Tinggi	8.157.177.477,00	7.006.670.329,00	85,90
3.02	Pariwisata	100,00	Sangat Tinggi	768.615.600,00	744.619.333,00	96,88
3.03	Pertanian	82,84	Tinggi	20.288.557.373,00	19.537.026.063,00	96,30
3.04	Kehutanan	70,20	Sedang	107.937.866.053,00	7.158.655.160,00	6,63
3.06	Perdagangan	93,93	Sangat Tinggi	10.897.338.400,00	10.336.879.738,00	94,86
3.07	Perindustrian	93,06	Sangat Tinggi	1.943.064.104,00	1.900.314.075,00	97,80
3.08	Transmigrasi	100,00	Sangat Tinggi	850.083.400,00	836.505.441,00	98,40
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	93,85	Sangat Tinggi	152.189.849.834,00	139.979.970.250,00	91,98
4.01	Administrasi Pemerintahan	97,80	Sangat Tinggi	84.388.080.273,00	76.275.871.812,00	90,39
4.02	Pengawasan	81,72	Tinggi	5.542.528.080,00	5.271.018.350,00	95,10
4.03	Perencanaan	90,20	Tinggi	15.178.744.146,00	14.521.762.928,00	95,67
4.04	Kuangan	98,70	Sangat Tinggi	31.800.995.835,00	29.413.582.567,00	92,49
4.05	Kepegawaian	96,14	Sangat Tinggi	15.275.171.500,00	14.493.404.593,00	94,88
4.07	Penelitian dan Pengembangan	98,52	Sangat Tinggi	4.330.000,00	4.330.000,00	100,00
	JUMLAH	91,34	Sangat Tinggi	1.763.283.551.750,00	1.578.134.527.016,77	89,50

PREDIKAT REALISASI ANGGARAN	ANGGARAN YANG BELUM TERSERAP (Rp)
Sangat Tinggi	63.823.590.086,20
Sangat Tinggi	9.278.579.137,09
Tinggi	26.700.944.434,11
Sangat Tinggi	25.350.042.646,00
Sangat Tinggi	1.996.572.668,00
Sangat Tinggi	267.787.607,00
Sangat Tinggi	229.663.594,00
Sangat Tinggi	5.793.522.795,03
Sangat Tinggi	66.637.516,00
Sangat Tinggi	103.928.430,00
Sangat Tinggi	254.815.932,00
Sangat Tinggi	2.751.254,00
Sangat Tinggi	544.997.345,00
Sangat Tinggi	608.965.569,00
Sangat Tinggi	295.960.042,00
Sangat Tinggi	391.264.504,00
Tinggi	1.996.766.451,00
Sangat Tinggi	418.202.356,03
Sangat Tinggi	21.416.859,00
Sangat Tinggi	236.498.845,00
Sangat Tinggi	268.306.237,00
Sangat Tinggi	45.060.351,00
Tinggi	318.594.926,00
Sangat Tinggi	141.301.845,00
Tinggi	78.054.333,00
Tinggi	103.322.032.268,00
Tinggi	1.150.507.148,00
Sangat Tinggi	23.996.267,00
Sangat Tinggi	751.531.310,00
Sangat Rendah	100.779.210.893,00
Sangat Tinggi	560.458.662,00
Sangat Tinggi	42.750.029,00
Sangat Tinggi	13.577.959,00
Sangat Tinggi	12.209.879.584,00
Tinggi	8.112.208.461,00
Sangat Tinggi	271.509.730,00
Sangat Tinggi	656.981.218,00
Sangat Tinggi	2.387.413.268,00
Sangat Tinggi	781.766.907,00
Sangat Tinggi	-
Tinggi	185.149.024.733,23

LAMPIRAN 2. KONSISTENSI PROGRAM DAN KEGIATAN ANTARA RKPD DAN APBD TAHUN 2019

KODE. REK	URUSAN	JUMLAH PROGRAM					PAGU PROGRAM			JUM	
		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak Sesuai di		RKPD	APBD	Selisih = (9 - 8)	RKPD	APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	49	55	46	3	9	549.363.420.358,44	1.366.667.911.900,00	817.304.491.541,56	255	237
1.01	Pendidikan	5	6	5	0	1	128.210.624.489,58	167.604.362.335,49	39.393.737.845,91	76	70
1.02	Kesehatan	14	13	13	1	0	153.723.531.411,86	187.872.441.893,51	34.148.910.481,65	43	44
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16	14	14	2	0	81.795.675.000,00	913.779.609.995,00	831.983.934.995,00	45	43
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4	8	4	0	4	170.647.577.056,00	80.427.155.018,00	(90.220.422.038,00)	25	22
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	4	5	4	0	1	10.802.338.780,00	12.865.434.137,00	2.063.095.357,00	36	33
1.06	Sosial	6	9	6	0	3	4.183.673.621,00	4.118.908.521,00	(64.765.100,00)	30	25
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	65	59	57	8	2	132.664.376.779,48	93.583.087.609,00	(39.081.289.170,48)	313	274
2.01	Tenaga Kerja	3	3	3	0	0	2.209.231.264,00	2.494.375.110,00	285.143.846,00	13	14
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	4	4	1	0	2.044.456.600,00	1.864.116.598,00	(180.340.002,00)	17	13
2.03	Pangan	3	3	3	0	0	8.130.392.462,70	3.901.038.970,00	(4.229.353.492,70)	12	12
2.04	Pertanahan	2	1	1	1	0	116.299.200,00	343.038.000,00	226.738.800,00	2	1
2.05	Lingkungan Hidup	4	5	4	0	1	16.420.070.587,00	18.422.790.660,00	2.002.720.073,00	47	39
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	1	1	1	0	0	10.488.976.800,00	7.238.778.443,00	(3.250.198.357,00)	29	28
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	4	4	4	0	0	8.291.972.160,88	6.874.688.230,00	(1.417.283.930,88)	50	51
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	4	4	1	0	17.820.829.000,00	4.592.046.800,00	(13.228.782.200,00)	21	19
2.09	Perhubungan	4	5	4	0	1	21.483.717.075,00	16.586.471.000,00	(4.897.246.075,00)	15	16
2.10	Komunikasi dan Informatika	6	6	6	0	0	33.362.435.671,90	13.467.043.100,00	(19.895.392.571,90)	29	27
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	4	4	2	0	775.410.000,00	591.448.000,00	(183.962.000,00)	5	5
2.12	Penanaman Modal	3	3	3	0	0	3.012.945.400,00	3.020.515.615,00	7.570.215,00	15	16
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	8	7	7	1	0	4.539.080.800,00	6.651.519.857,00	2.112.439.057,00	14	12
2.14	Statistik	3	2	2	1	0	642.637.458,00	1.374.719.200,00	732.081.742,00	26	5
2.16	Kebudayaan	2	2	2	0	0	2.141.152.400,00	2.438.158.376,00	297.005.976,00	8	7
2.17	Perpustakaan	1	1	1	0	0	550.065.250,00	2.905.525.550,00	2.355.460.300,00	5	5
2.18	Kearsipan	5	4	4	1	0	634.704.650,00	816.814.100,00	182.109.450,00	5	4
3	URUSAN PILIHAN	27	23	23	4	0	245.355.503.731,73	150.842.702.407,00	(94.512.801.324,73)	167	149
3.01	Kelautan dan Perikanan	6	5	5	1	0	15.739.061.370,00	8.157.177.477,00	(7.581.883.893,00)	29	24
3.02	Pariwisata	3	2	2	1	0	1.377.962.000,00	768.615.600,00	(609.346.400,00)	7	3
3.03	Pertanian	10	9	9	1	0	27.827.706.111,00	20.288.557.373,00	(7.539.148.738,00)	78	70
3.04	Kehutanan	1	1	1	0	0	186.791.436.037,68	107.937.866.053,00	(78.853.569.984,68)	24	24
3.06	Perdagangan	4	3	3	1	0	10.048.177.800,00	10.897.338.400,00	849.160.600,00	19	17
3.07	Perindustrian	2	2	2	0	0	2.417.336.213,05	1.943.064.104,00	(474.272.109,05)	5	6
3.08	Transmigrasi	1	1	1	0	0	1.153.824.200,00	850.083.400,00	(303.740.800,00)	5	5
4	URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG	31	26	25	6	1	156.625.222.595,10	152.189.849.834,00	(4.435.372.761,10)	366	302
4.01	Administrasi Pemerintahan	6	5	5	1	0	111.217.406.763,23	84.388.080.273,00	(26.829.326.490,23)	181	177
4.02	Pengawasan	5	4	4	1	0	2.246.806.650,00	5.542.528.080,00	3.295.721.430,00	55	22
4.03	Perencanaan	11	10	10	1	0	15.399.075.820,00	15.178.744.146,00	(220.331.674,00)	44	43
4.04	Keuangan	5	4	3	2	1	12.109.403.861,87	31.800.995.835,00	19.691.591.973,13	75	52
4.05	Kepegawaian	3	2	2	1	0	15.635.941.500,00	15.275.171.500,00	(360.770.000,00)	10	7
4.07	Penelitian dan Pengembangan	1	1	1	0	0	16.588.000,00	4.330.000,00	(12.258.000,00)	1	1
		172	163	151	21	12	1.084.008.523.464,75	1.763.283.551.750,00	679.275.028.285,25	1101	962

LAH KEGIATAN			
Sesuai	Tidak Sesuai di		Cek B/S
	RKPD	APBD	
13	14	15	
234	21	3	237
70	6	0	70
43	0	1	44
42	3	1	43
22	3	0	22
32	4	1	33
25	5	0	25
269	45	5	274
13	0	1	14
13	4	0	13
12	0	0	12
1	1	0	1
38	9	1	39
28	1	0	28
50	0	1	51
19	3	0	19
15	0	1	16
27	2	0	27
5	0	0	5
15	0	1	16
12	2	0	12
5	21	0	5
7	1	0	7
5	0	0	5
4	1	0	4
124	19	1	125
24	5	0	24
3	4	0	3
70	8	0	70
0	0	0	0
17	2	0	17
5	0	1	6
5	0	0	5
299	67	3	302
175	6	2	177
22	33	0	22
43	1	0	43
51	24	1	52
7	3	0	7
1	0	0	1
926	152	12	1639